

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dalam strategi defensif QRIS Cross-Border terbukti mendukung upaya Indonesia mengurangi *external vulnerability* yang timbul akibat dominasi dolar AS. Melalui integrasi QR lintas batas yang dipadukan dengan *Local Currency Settlement*, Indonesia berhasil mengalihkan sebagian transaksi ritel internasional dari mekanisme berbasis dolar menuju penggunaan mata uang lokal. Hal ini memperkuat stabilitas nilai tukar, mengurangi tekanan permintaan dolar, serta memperluas ruang kebijakan moneter domestik. Selain itu, digitalisasi transaksi lintas negara melalui QRIS meningkatkan kapasitas negara dalam memantau arus keuangan lintas batas yang selama ini sulit diawasi dalam sistem pembayaran konvensional berbasis jaringan kartu internasional. Penguatan arsitektur pembayaran domestik melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) juga memperkuat kedaulatan digital Indonesia, sehingga negara tidak lagi sepenuhnya bergantung pada infrastruktur pembayaran global yang berada di bawah yurisdiksi Amerika Serikat. Kemudian pada strategi ofensif QRIS Cross-Border memperluas pengaruh Indonesia dalam pembentukan standar teknis pembayaran regional. Melalui keberhasilan mengeksport standar QR domestik ke Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Jepang, Indonesia memperlihatkan kapasitas agenda-setting yang menjadi inti strategi ofensif menurut Armijo. Implementasi QRIS Cross-Border menempatkan Indonesia sebagai salah satu aktor utama dalam proyek *ASEAN Payments Connectivity* dan *Regional Payment Connectivity*, serta

memperkuat posisi Indonesia dalam upaya regional de-dolarisasi. Diplomasi finansial yang dijalankan Bank Indonesia melalui forum ASEAN, G20, dan BIS menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pengikut, melainkan pembentuk arah kebijakan integrasi pembayaran kawasan. Dengan demikian, QRIS Cross-Border bukan hanya alat digital untuk transaksi ritel, tetapi instrumen strategis yang memperkuat pengaruh Indonesia dalam arsitektur keuangan Asia Tenggara. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa QRIS Cross-Border merupakan inovasi finansial yang efektif dalam mendukung strategi *financial statecraft* Indonesia. QRIS memberikan ruang bagi Indonesia untuk memperkuat stabilitas nilai tukar, mengurangi eksposur terhadap dolar, memperluas kedaulatan infrastruktur pembayaran, serta membangun pengaruh regional dalam integrasi keuangan. Melalui strategi defensif dan ofensif yang saling melengkapi, Indonesia berupaya membangun ekosistem pembayaran regional yang lebih otonom dan mengurangi dominasi struktural Amerika Serikat dalam sistem keuangan internasional.

## 5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan untuk memperkuat efektivitas QRIS Cross-Border sebagai instrumen *financial statecraft*. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu memperluas cakupan negara mitra QRIS Cross-Border dan Local Currency Settlement, terutama ke negara-negara dengan intensitas perdagangan tinggi seperti Vietnam, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok. Ekspansi mitra akan meningkatkan volume transaksi berbasis mata uang lokal dan memperkuat posisi Indonesia dalam upaya de-dolarisasi regional. Integrasi QRIS

dengan sistem pembayaran global perlu diikuti oleh penguatan keamanan data dan tata kelola digital. Mengingat data transaksi lintas negara menjadi bagian penting dari kedaulatan finansial, Indonesia perlu memastikan bahwa seluruh proses switching, routing, dan settlement berada dalam yurisdiksi domestik. Penguatan regulasi perlindungan data, termasuk kerja sama dengan lembaga internasional, menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas sistem pembayaran nasional. Pemerintah perlu mendorong literasi digital dan literasi keuangan masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM dan wisatawan yang menjadi pengguna utama QRIS Cross-Border. Adopsi teknologi yang lebih luas akan memperbesar dampak struktural QRIS dalam mengurangi ketergantungan pada dolar sekaligus meningkatkan efisiensi ekonomi regional. Indonesia harus memperkuat diplomasi finansial di forum multilateral seperti ASEAN, G20, dan BIS untuk memperkokoh legitimasi standar pembayaran berbasis QR Indonesia. Indonesia perlu terus mendorong harmonisasi standar teknis antarnegara dan memperluas penggunaan QRIS sebagai standar interoperabilitas pembayaran kawasan. Diplomasi yang konsisten akan memperbesar kapasitas Indonesia dalam memainkan peran sebagai agenda-setter dalam arsitektur keuangan internasional. Akhirnya, penelitian ini menyarankan agar kajian akademik mengenai QRIS Cross-Border terus dikembangkan, terutama terkait dampaknya terhadap stabilitas makroekonomi, integrasi keuangan regional, dan dinamika geopolitik keuangan internasional. Kajian lanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa strategi *financial statecraft* Indonesia tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi, regulasi global, dan perubahan struktur sistem keuangan internasional.

### 5.3 Keterbatasan dan Kritik

Penulis menyadari penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam memberikan hasil. Keterbatasan berkaitan dengan ketersediaan data empiris mengenai penggunaan QRIS Cross-Border dan *Local Currency Settlement* (LCS). Data yang tersedia masih terbatas dalam rentang waktu 2022-2024, sehingga dampak jangka panjang terhadap stabilitas nilai tukar, arsitektur pembayaran, maupun ketergantungan terhadap dolar belum dapat dinilai secara komprehensif. Selain itu, sebagian data transaksi lintas negara yang terkait dengan efektivitas dedolarisasi tidak dipublikasikan secara rinci oleh Bank Indonesia maupun bank sentral mitra, sehingga analisis dalam penelitian ini bergantung pada data sekunder yang telah diolah oleh lembaga resmi. Kerkaitan dengan ruang lingkup teori *financial statecraft* Armijo. Meskipun kerangka Armijo dapat menjelaskan strategi defensif dan ofensif Indonesia melalui QRIS Cross-Border, teori ini lebih banyak dikembangkan untuk menganalisis kebijakan negara besar dan struktur keuangan global secara makro. Indonesia sebagai negara berkembang, beberapa aspek mikro seperti literasi digital, kesiapan infrastruktur, dan perilaku konsumen tidak sepenuhnya tercakup dalam kerangka teoritis tersebut. Akibatnya, terdapat aspek empiris yang tidak sepenuhnya dapat dipetakan oleh kategorisasi Armijo. Ruang lingkup analisis geopolitik yang terbatas. Meskipun penelitian ini menempatkan dominasi Amerika Serikat sebagai konteks struktural, penelitian ini tidak membahas secara mendalam tanggapan AS, Uni Eropa, atau Tiongkok terhadap upaya regional payment connectivity di ASEAN. Padahal secara geopolitik, setiap perubahan dalam arsitektur pembayaran internasional berpotensi mempengaruhi dinamika kekuatan global. Keterbatasan ini membuka ruang untuk penelitian lanjutan yang lebih fokus pada respons negara besar terhadap inisiatif regional yang

dipimpin Indonesia. Meskipun demikian, keterbatasan-keterbatasan ini tidak mengurangi kontribusi utama penelitian ini dalam menjelaskan peran QRIS Cross-Border sebagai instrumen *financial statecraft* Indonesia. Sebaliknya, keterbatasan tersebut membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk memperdalam analisis melalui data yang lebih lengkap, pendekatan teoritis yang lebih beragam, serta metode penelitian yang lebih komprehensif.

